

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI BANJIR DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Manuel Walker Parsaoran Gultom

NPP. 30.1193

*Asdaf Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:

manuelgultom099@gmail.com

ABSTRACT

Background: *The author focuses on the problem, namely the people of Serang Regency are still littering which clogs the drainage flow, there is still a lack of facilities and infrastructure in dealing with flood disasters, there are still illegal buildings standing along the Cibanten River tributaries. This requires coordination involving various government agencies in dealing with flood problems in Serang District.* **Purpose :** *The purpose of this study is to identify and analyze Government Coordination in Overcoming Floods in Serang District, Banten Province, to identify and analyze the supporting factors and inhibiting factors for Government Coordination in Overcoming Floods in Serang District, Banten Province, to identify and analyze efforts to overcome the inhibiting factors in Regional Government Coordination in Overcoming Floods in Serang District, Banten Province.* **Method:** *The research method in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation.* **Results/Findings:** *Obstacles that occur in the coordination carried out to overcome the problem of floods in Serang Regency are supporting facilities and infrastructure such as safety equipment for community members that have not been fulfilled, lack of budget availability for implementing personnel in the field which has an impact on the lack of resilience of personnel in handling of floods because there is no material support for these personnel.* **Conclusion:** *The results of this study show that the coordination carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Serang Regency with related agencies is still not good according to the theory of coordination by George R. Terry in Erliana Hasan. Supporting factors and inhibiting factors for the coordination process came from internal and external to the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Serang Regency. Efforts made to overcome the inhibiting factors are coordinating with each other in handling disasters, especially floods so that the implementation of coordination with related regional apparatus in dealing with floods can run effectively.*

Keywords: *Coordination, Governance, Regional Disaster Management Agency (BPBD)*

ABSTRAK

Latar Belakang : Penulis berfokus pada permasalahan yaitu masyarakat Kabupaten Serang masih membuang sampah sembarangan yang membuat aliran drainase tersumbat, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir, masih terdapat adanya bangunan liar yang berdiri di sepanjang anak jalan Sungai Cibanten. Hal ini membutuhkan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak instansi pemerintahan dalam mengatasi masalah banjir di Kabupaten Serang. **Tujuan** : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Pemerintahan dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten, mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten. **Metode** : Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan**: Hambatan yang terjadi dalam koordinasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan bencana banjir di Kabupaten Serang adalah fasilitas sarana dan prasarana penunjang seperti alat keselamatan bagi warga masyarakat itu belum terpenuhi, kurangnya ketersediaan anggaran bagi personil pelaksana di lapangan yang berdampak pada kurang tanggunya personil dalam penanganan banjir karena tidak adanya dukungan secara material bagi personil tersebut. **Kesimpulan** : Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang dengan instansi terkait masih belum baik yang ada pada teori koordinasi oleh George R. Terry dalam Erliana Hasan. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses koordinasi berasal dari internal dan eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah saling berkoordinasi dalam penanganan bencana khususnya banjir sehingga pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mengatasi banjir dalam berjalan dengan efektif.

Kata kunci: Koordinasi, Pemerintahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan peristiwa yang setiap tahun menjadi topik pemberitaan. Ketika musim hujan tiba, banyak kota di Indonesia yang mengalami banjir. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membuat kanal, membuat bendungan, dan reboisasi hutan tetapi masih belum ada yang dapat menyelesaikan masalah tersebut bahkan kelihatannya semakin lama semakin luas jangkauannya, baik dari luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Banjir di Indonesia tidak pernah berhenti setiap tahun dan selalu datang yang mengakibatkan banyak daerah-daerah yang terkena dampaknya. Menurut BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2021) terdapat sebanyak 7.574 kasus banjir Di Indonesia dari 2011-2020. Banjir ini memiliki tingkat intensitas yang sering selama 10 tahun terakhir ini. Di Indonesia pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 1298 kejadian banjir. Banyak Provinsi di Indonesia yang terkena banjir besar tersebut yaitu Aceh, Jawa tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Banten. Kabupaten Serang menjadi Kawasan di Indonesia yang juga memiliki daerah yang rawan banjir. Ancaman banjir ini membuat resah sejumlah warga masyarakat yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini sesuai dengan data yang diberikan oleh

Badan Pusat Statistik mengenai kejadian banjir di Kabupaten Serang, banjir menjadi bencana yang lumayan sering terjadi. Penyebab banjir yang sering terjadi di Kabupaten Serang adalah karena sungai Cibanten mengalami penyempitan yang mengakibatkan tidak mampu menahan debit air dari waduk Sindang Heula, daya tampung sungai yang kurang memadai sehingga menerjang permukiman warga serta lahan sawah, danau dan bendungan yang terbatas serta curah hujan yang cukup tinggi. Biasanya banjir terjadi pada bulan Desember-Februari yaitu pada saat curah hujan yang tinggi setiap tahunnya.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten yaitu banjir besar yang melanda Kabupaten Serang pada tahun 2022 yang mencapai ketinggian 5 meter lebih dan tercatat banyak rumah warga yang rusak dan lumpuh total disebabkan oleh meluapnya kali Cibanten dan sistem drainase yang buruk karena membuang sampah sembarangan yang menyumbat saluran drainase. Lokasi dan kondisi drainase Kabupaten Serang yang dapat menyebabkan banjir, terutama pada musim hujan, dan juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bangunan liar di sepanjang sungai dapat menjadi faktor penyebab banjir. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bangunan liar dapat menghambat aliran air yang seharusnya mengalir bebas di sepanjang sungai. Dalam situasi hujan lebat atau curah hujan yang tinggi, aliran air menjadi semakin deras dan dapat membanjiri area di sekitarnya. Jika aliran air sudah terhambat oleh bangunan liar, maka kemungkinan banjir akan semakin besar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang menemukan terdapat ada 42 titik pelanggaran tata ruang di bantaran sungai yang tersebar di Kabupaten Serang. Personil yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang juga belum memperlihatkan adanya standar yang ada yaitu hanya beranggotakan sebanyak 20 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) yang membantu dalam penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Serang. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Serang tahun ini dalam penanggulangannya masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang terkena dampak banjir. Bentuk penanggulangan yang dinilai belum maksimal, seperti jumlah peralatan dari BPBD Kabupaten Serang saat ini masih kurang terlebih lagi kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Serang cukup parah sehingga BPBD Kabupaten Serang meminta penambahan perahu karet untuk alat evakuasi warga ketika banjir.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan koordinasi pemerintahan daerah sebagai referensi atau perbandingan untuk dijadikan sebagai acuan. Penelitian dari Rusdianto (2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar) melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa koordinasi oleh BPBD dalam penanggulangan banjir di Kota Makassar belum berjalan seperti yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif – analitis, Teknik Pengumpulan data studi kasus dengan mengumpulkan bahan

melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori koordinasi menurut tahapan pra banjir, saat banjir dan pasca. Penelitian dari Marino Y.C Marbun (2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara) melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPBD Kota Medan melaksanakan koordinasi dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Medan bersama Dinas-Dinas Pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kecamatan Medan Maimun sebagai salah satu korban banjir di Kota Medan, Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi. Teknik pengambilan data yaitu dengan mengumpulkan bahan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori koordinasi menurut Sugandha.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kabupaten Serang Provinsi Banten. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan dua penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Koordinasi Pemerintahan dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Koordinasi Pemerintahan dalam Mengatasi Banjir Di Kabupaten Serang Provinsi Banten dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Pemerintahan dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten, mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten.

II. METODE

Menurut Fernandes Simangunsong (2017:231), data yang didapat dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka yang diperoleh dari hasil dari wawancara dan didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang

telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Koordinasi Pemerintahan Dalam Menangani Banjir Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sekda Kabupaten Serang, Kepala BPBD Kabupaten Serang, Kepala Bidang BPBD Kabupaten Serang, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Kepala Dinas Permukiman Kabupaten Serang dan Tokoh-tokoh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten menggunakan teori dari *George R. Terry* dalam Erliana Hasan. Teori tersebut memiliki 7 indikator dalam mengukur koordinasi pemerintahan yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan Oleh Pihak Yang Berkoordinasi, Insentif Koordinasi dan *Feedback*. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1 Komunikasi

Terdapat adanya komunikasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang dengan instansi terkait. Penulis setuju bahwa komunikasi sangatlah penting dalam berkoordinasi. Pimpinan instansi atau dinas terkait sudah menjalin hubungan baik dengan instansi lain sehingga apabila ada permasalahan akan direspons dengan cepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang sudah membuat sebuah sistem komunikasi tentang bencana yang dijalin oleh BPBD dengan semua perangkat daerah yang terkait , dan juga menjalin komunikasi dengan masyarakat.

3.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pimpinan sudah memiliki pengetahuan maupun kemampuan yang baik tentang pentingnya koordinasi. Dilihat dari terdapat pegawai yang bekerja sudah sesuai dengan bidangnya. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang sendiri sudah ada grup *WhatsApp* yang didalamnya terdapat info BPBD dan info layanan penanganan bencana untuk mempermudah koordinasi antar perangkat daerah. Begitu pula dengan masalah internal BPBD sudah dapat teratasi dan berjalan dengan baik karena mempunyai komitmen dan Kerjasama dengan instansi terkait mengatasi bencana khususnya banjir di Kabupaten Serang. sudah berjalan dengan baik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Dalam penanganan banjir di Kabupaten Serang pada setiap bidang sudah terlaksana karena sudah ada grup yang memantau perkembangan bencana dan berkoordinasi untuk penanganannya. Kemudian penanganan banjir sudah terpusat pada Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) dan sudah terbentuk Tim Lintas OPD yang membantu, mengawasi dalam penanganan banjir.

3.3 Kompetensi Partisipan dan Kalender Pemerintahan

Dalam penanggulangan bencana sudah melibatkan pejabat yang kompeten dan sudah melibatkan perangkat daerah lain dan instansi terkait penanganan bencana banjir dan terus melakukan koordinasi Pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak dan juga sudah ada fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Serang. Masing-masing pihak perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang khususnya bagi BPBD Kabupaten Serang, Bappeda Kabupaten Serang dan Dinas PUPR Kabupaten Serang sudah bisa menerapkan ketaatan terhadap kehadiran.

3.4 Kesepakatan dan Komitmen

Sudah dilakukan agenda pertemuan dalam rangka mengatasi banjir di Kabupaten Serang. Tetapi biasanya pemerintah langsung turun ke lokasi untuk pertolongan pertama kepada korban banjir. Komunikasi dilakukan langsung oleh pemerintah daerah melalui grup terkait kebutuhan lapangan untuk penanganan banjir. Kegiatan agenda pertemuan dalam upaya menuju kesepakatan dan komitmen sudah dilakukan tetapi terjadi hanya pada waktu tertentu saja. Masyarakat juga diberikan kegiatan pelatihan dan sosialisasi mengenai edukasi mitigasi bencana banjir. Sudah ada dilakukan pertemuan yang sifatnya formal yaitu dengan mengadakan rapat dan evaluasi mengenai penanganan banjir di Kabupaten Serang. Kemudian agenda pertemuan juga dilakukan secara informal yang langsung turun ke tempat lokasi tempat banjir. Tetapi ada juga yang dilakukan secara insidental ketika berada dilapangan. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan bencana banjir.

3.5 Penetapan Kesepakatan Oleh Pihak Yang Berkoordinasi

Bahwa sudah adanya bentuk kesepakatan dari penetapan kesepakatan tersebut. Bukti ini dapat disampaikan secara tulisan, dalam bentuk notulensi yang nantinya menjadi pedoman dan setiap perangkat daerah yang terkait melakukan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kemudian dari internal juga akan melakukan pendistribusian tugasnya terhadap pejabat-pejabat perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan selalu dilaksanakan setelah adanya keputusan yang diambil dan kemudian di evaluasi pelaksanaannya. Seperti dilakukan pelatihan pencegahan bencana kepada masyarakat Kabupaten Serang yang rawan, kemudian melakukan rapat koordinasi terkait penanganan banjir. Hal ini didasarkan pada hasil pertemuan yang telah dilakukan bersama untuk menyampaikan permasalahan dan hambatan dari setiap instansi yang terlibat.

3.6 Insentif Koordinasi

Insentif bagi para pelaksana kegiatan koordinasi belum ada dan biayanya terbatas. Insentif tersebut sudah disiapkan oleh BPBD tetapi anggarannya terbatas, kemudian insentif diberikan hanya untuk bencana besar yang memakai DSP (Dana Siap Pakai), kalau untuk bencana yang kecil itu tidak ada insentif. Terlebih lagi insentif yang diberikan kepada personil yang turun ke lapangan itu tidak ada semenjak pandemi Covid-19. Hampir seluruh pihak terkait sudah menerapkan sanksi bagi oknum-oknum yang melanggar kesepakatan dari koordinasi yang telah dilakukan. Pemberian sanksi ini dilakukan sebagai bentuk *punishment*

dan teguran dari hasil kinerja pegawai yang masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.7 *Feedback*

Perangkat daerah terkait yang ikut berperan aktif dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Serang mendapatkan tanggapan dan penilaian yang baik dari masyarakat karena capaian hasil kinerja yang dianggap cukup memuaskan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala namun sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan cukup baik. Perubahan terhadap hasil kesepakatan melalui evaluasi. Evaluasi ini dilakukan terkait penanganan bencana yang ada di Kabupaten Serang untuk menjadi rujukan dan juga terdapat PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) yang dari hal tersebut menjadi bahan evaluasi buat melihat kinerja termasuk situasi dilapangan dan antisipasi.

3.8 **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Koordinasi pemerintahan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten belum berjalan dengan tepat sasaran dan masih belum sesuai dengan pelaksanaan koordinasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal yang diharapkan. Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Bersama beberapa perangkat daerah terkait sebenarnya belum dikatakan baik, usaha yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang dalam melakukan koordinasi dalam mengatasi permasalahan banjir tentu tidak akan lepas dari sedikit banyaknya kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu Fasilitas sarana dan prasarana penunjang seperti alat keselamatan bagi warga masyarakat itu belum terpenuhi, kurangnya ketersediaan anggaran bagi personil pelaksana di lapangan yang berdampak pada kurang tanggunhnya personil dalam penanganan banjir karena tidak adanya dukungan secara material bagi personil tersebut, masih belum maksimalnya penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari masing-masing penanggungjawab karena terkendala oleh kurang tertibnya administrasi.

IV. **KESIMPULAN**

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang dengan instansi terkait masih belum baik yang ada pada teori koordinasi oleh George R. Terry dalam Erliana Hasan. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses koordinasi berasal dari internal dan eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah saling berkoordinasi dalam penanganan bencana khususnya banjir sehingga pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mengatasi banjir dalam berjalan dengan efektif.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Serang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat *George R. Terry* dalam Erliana Hasan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Banjir Di Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Erliana dan Eva Eviany. 2014. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*. Jakarta.
- Marbun, Marino Yenni Christanti. 2013. *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Rusdianto. 2015. *Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.

